

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Korupsi adalah salah satu penyakit masyarakat yang sama dengan jenis kejahatan lain seperti pencurian, sudah ada sejak manusia bermasyarakat di atas bumi ini. Yang menjadi masalah utama adalah meningkatnya korupsi itu seiring dengan kemajuan kemakmuran dan teknologi. Bahkan ada gejala dalam pengalaman yang memperlihatkan, semakin maju pembangunan suatu bangsa, semakin meningkat pula kebutuhan dan dorongan orang untuk melakukan korupsi.¹

Korupsi merupakan penyakit yang membebani negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Bahkan banyak ahli menyatakan bahwa penyakit korupsi di Indonesia telah melebar ke segala lapisan dalam struktur pemerintah. Korupsi telah menjadi isu sentral, bahkan sangat populer melebihi isu apa pun yang muncul di Indonesia. *Trend* perilaku korupsi tampak semakin endemis yang merambah dalam segala aspek kehidupan masyarakat. Korupsi menjadi suatu yang biasa dan seakan-akan telah membudaya dalam masyarakat Indonesia.²

Demikianlah realitasnya, Bangsa Indonesia masih sedang mengalami suasana keprihatinan yang bertubi-tubi. Hasil survei menunjukkan bahwa

¹Jur. Andi Hamzah, *Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 1.

²Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, *Fikih Anti Korupsi Perspektif Ulama Muhammadiyah* (Jakarta: PSAP, 2006), 25.

negeri kita masih bertengger dalam jajaran negara yang paling korup di dunia, KKN melanda di berbagai institusi, disiplin makin longgar semakin meningkatnya tindak kriminal, tindak kekerasan, *anarchisme*, *premanisme*, konsumsi minum keras dan narkoba sudah melanda di kalangan pelajar dan mahasiswa. Masyarakat kita juga cenderung mengarah pada masyarakat kepentingan/patembayan (*gesellschaft*), nilai-nilai masyarakat peguyuban (*gemeinschaft*) sudah ditinggal, yang tampak di permukaan adalah timbulnya konflik kepentingan-kepentingan, baik kepentingan individu, kelompok, agama, etnis, politik, maupun kepentingan lainnya.³

Masyarakat pun mengenal praktik korupsi yang telah disamakan dengan banyak istilah. Misalnya, uang administrasi, uang tip, angpao, uang diam, uang bensin, uang pelicin, uang ketok, uang kopi, uang makan, uang pangkal, uang rokok, uang damai, uang di bawah meja, tahu sama tahu, uang semir, uang lelah, uang pelancar atau pelumas, dan uang salam tempel. Beberapa istilah ini dapat dijumpai, terutama ketika ada orang yang berperkara. Bahkan ketika seseorang mengurus keperluan di RT/RW, kelurahan/desa, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, beberapa istilah tersebut acap kali digunakan. Karena itu tidak berlebihan jika Mochtar Lubis mengatakan bahwa korupsi memang berwajah banyak. Hebatnya lagi, praktik korupsi dilakukan

³Walhasil, bangsa Indonesia memang sedang menghadapi krisis multidimensional. Dari hasil kajian pelbagai disiplin dan pendekatan, tampaknya ada kesamaan pandangan bahwa segala macam krisis itu berpangkal dari krisis akhlak atau moral. Krisis ini, secara langsung atau tidak, berhubungan dengan persoalan pendidikan. Krontribusi pendidikan dalam konteks ini adalah pada pembangunan mentalitas manusia yang merupakan produknya. Ironisnya, krisis tersebut menurut sementara pihak-pihaknya-disebabkan karena kegagalan pendidikan agama, termasuk di dalamnya pendidikan agama Islam. Lihat, Muhaimin, *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Sekolah, Madrasah, dan Perguruan Tinggi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), 17-18..

sepanjang hayat, sejak masa kelahiran (ketika orang mengurus akte) hingga kematian (ketika orang mengurus pemakaman).⁴

Sebagai konklusi korupsi adalah perbuatan yang tidak terpuji atau berakhlak tercela yang bisa merugikan negara maupun orang lain bahkan diri sendiri. Dilapangan korupsi bermacam-macam bentuknya namun bisa dikategorikan dalam dua tipe korupsi, yaitu; korupsi secara struktural, yakni suatu tindakan kejahatan dalam katagori kriminal yang melibatkan wewenang atau kekuasaan. Tipe ini pelakunya adalah para pejabat pemerintah. Kedua, korupsi secara kultural atau berkaitan dengan tradisi dan prilaku masyarakat yang mendukung tumbuh suburnya korupsi, pelaku biasanya masyarakat itu sendiri.⁵

Korupsi dengan berbagai definisi dan manefestasinya telah menjadi bagian tak terpisahkan dari perjalanan sejarah negeri yang bernama Indonesia. Rakyat Indonesia sudah sangat lelah mendengar dan membicarakan korupsi yang akhir-akhir ini tambah marak baik dari pejabat tinggi sampai pejabat yang paling bawah. Maraknya tindakan korupsi dinegri ini merupakan sebuah ironi di tengah-tengah masyarakat yang mayoritas beragama Islam. Tindakan memperkaya diri sendiri maupun kelompok dengan cara yang tidak benar, jelas-jeles dilarang. Agama Islam, melalui al-Qur'an dan Hadith, secara tegas melarang segala bentuk perolehan dan menjadi gejala disetiap lapisan masyarakat. Terlepas dari itu semua tampaknya korupsi tidak akan berhenti

⁴Biyanto, *Pemberantasan dan Perwujudan Integritas Publik Pengamalan Muhammadiyah dan NU*, Makalah Disampaikan Dalam Seminar Nasional Hasil Penelitian Kerjasama IAIN Sunan Ampel dan Tiri Making Integrity Work. Surabaya, 12 Oktober 2010.

⁵Sargoni ,www.cetak.bangkapos.com/opini/read/335.html-Tembolok-mirip.

dan habis walaupun para pemburu koruptor selalu berhasil menangkap pelaku koruptor. Tetap saja tidak ada kata kapok alias tobat, malah seolah-olah mumpung ada kesempatan mereka bereaksi sehingga istilah 4H (halal haram hantam habis) menjadi target utama jabatan.

Memang, bagi mereka yang terlanjur melakukan tindak korupsi dan terbiasa melakukan praktek korupsi, tampaknya pendidikan tidak akan berdampak apa pun. Bukankah mereka sejak awal sudah tahu bahwa tindakan itu dilarang? Mereka juga tahu bahwa ajaran agama manapun mengajarkan bahwa korupsi itu jahat. Tetapi mereka tetap korupsi juga. Untuk mereka ini, kiranya pemberantasan korupsi hanya bisa dilakukan jika hukum dan penegakan hukum dilaksanakan secara sangat tegas.⁶ Karena tindakan korupsi di negeri ini seringkali dilakukan tidak secara personal, tetapi dilakukan secara kolektif, struktural, dan sistematis. Sehingga secara tidak langsung korupsi lambat laun menjadi sebuah budaya.

Sementara itu, dunia pendidikan kini nampaknya mulai merasa bertanggung jawab akan pentingnya penanaman kesadaran melawan perilaku korupsi melalui institusi resmi sekolah yaitu Pendidikan Antikorupsi. Pendidikan Antikorupsi adalah tanggung jawab dunia pendidikan secara keseluruhan sehingga hendaknya ide pendidikan antikorupsi tidak hanya ada pada kurikulum pendidikan nasional di bawa kementrian pendidikan nasional namun juga dunia pendidikan di bawa kementrian departemen agama termasuk pendidikan tinggi didalamnya. Dengan adanya penanaman nilai-nilai agama

⁶Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, *Fikih Anti Korupsi*, 124.

dan moral mencegah korupsi secara spesifik melalui dunia pendidikan formal seperti melalui kurikulum SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA, dan PTAI maka diharapkan mampu memberikan kontribusi pada pembangunan mental dan moral yang bersih dan jujur sehingga masalah korupsi akan dapat relatif ditekan dan selanjutnya dihilangkan di Indonesia.

Selama ini pendidikan agama dan moral disekolah belum bisa mencegah masyarakat untuk tidak melakukan korupsi. Sebab, pendidikan agama hanya ditekankan pada bagaimana cara menghafal kitab suci dan tata cara ibadah. Sedangkan pendidikan moral lebih menitikberatkan pendidikan kewarganegaraan. Akhirnya, sikap perilaku, mental, dan budaya korupsi berkembang justru dari institusi sekolah, keluarga, dan masyarakat atau sebaliknya dari masyarakat, sekolah, dan keluarga. Itu sebabnya mencegah korupsi harus diajarkan sejak dini, disekolah sehingga keluarga dan masyarakat juga terdidik untuk bersikap, berperilaku, bermental, dan berbudaya antikorupsi.

Itulah sebabnya, pengajaran agama harus terkait dengan realitas kehidupan dimana siswa diajak secara aktif melihat, mengamati, mengambil sikap terhadap kejadian itu, bukan hanya sekedar hapalan yang melekat dibibir dan mewarnai kulit, tapi tidak mampu mengubah perilaku. Karena itu, sudah selayaknya pola pembinaan agama yang diajarkan sekolah lebih dititik beratkan kepada pengamalan ibadah dalam aktifitas sehari-hari dalam bentuk

prilaku dan tindakan tidak sekedar transfer ilmu, tetapi mengajarkan pendidikan agama yang otentik.⁷

Sejalan dengan itu, dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 pasal 3 tentang Sisdiknas disebutkan:

Bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.⁸

Sesungguhnya apa yang terdapat dalam rumusan sistem pendidikan nasional diatas dapat dikatakan sudah memadai untuk membentuk peserta didik menjadi pribadi yang tangguh, di samping menguasai berbagai disiplin ilmu dan keterampilan juga memiliki akhlak dan budi pekerti yang luhur.

Berdasarkan tujuan diatas, maka pemerintah memasukkan kurikulum pendidikan karakter di sekolah untuk mencegah korupsi yang meraja lelah di negeri ini, menurut Azyumardi Azra, bisa dilakukan setidaknya melalui pendekatan, sebagai berikut: *pertama*, menerapkan pendekatan modeling atau *exemplary* atau *uswah hasanah*. Yakni mensosialisasikan dan membiasakan lingkungan sekolah untuk menghidupkan dan menegakkan nilai-nilai akhlak dan moral yang benar melalui model atau teladan.

Kedua, menjelaskan atau mengkalrifikasikan kepada peserta didik secara terus-menerus tentang berbagai nilai yang baik dan buruk. Usaha ini bisa dibarengi pula dengan langkah-langkah; memberi penghargaan (*prizing*)

⁷Benny Susetyo, *Politik Pendidikan Penguasa* (Yogyakarta: PT LKiS Pelangi Aksara, 2005), 91.

⁸Tim Redaksi Sinar, *UU Sistem Pendidikan Nasional* (UU RI Nomor 20 Tahun 2003) (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 7.

dan menumbuhkan (*cherising*) nilai-nilai yang baik, dan sebaliknya mengecam dan mencegah (*discouraging*) berlakunya nilai-nilai yang buruk; menegaskan nilai-nilai yang baik dan buruk secara terbuka dan kontinyu; memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memilih berbagai alternatif sikap dan tindakan berdasarkan nilai; melakukan pilihan secara bebas setelah menimbang dalam-dalam berbagai konsekuensi dari setiap pilihan dan tindakan; membiasakan bersikap dan bertindak dengan pola-pola yang baik yang diungguli secara terus-menerus dan konsisten.

Ketiga, menerapkan pendidikan berdasarkan karakter (*character-based education*). Hal ini bisa dilakukan dengan menerapkan *character-based approach* ke dalam setiap mata pelajaran yang ada di samping matapelajaran-matapelajaran khusus untuk pendidikan karakter; seperti pelajaran agama, sejarah Pancasila, dan sebagainya. Memandang kritik terhadap matapelajaran-matapelajaran terakhir ini, maka perlu dilakukan reorientasi baik dari segi isi/muatan dan pendekatan hafalan, tetapi betul-betul berhasil membantu pembentukan karakter.⁹ Oleh sebab itu, pendidikan masih dapat diharapkan dapat menanamkan dan menyebarkan nilai-nilai antikorupsi kepada para anak didik, sehingga sejak dini mereka memahami bahwa korupsi itu bertentangan dengan norma hukum dan norma agama.¹⁰

Dengan demikian, munculnya tindakan korupsi di Indonesia yang dalam penelitian ini khusus menyoroti Pendidikan Antikorupsi telah memberikan paradigma baru dalam mengatasi atau mencegah tindakan korupsi

⁹Azyumardi Azra, *Paradigma Baru Pendidikan Nasional Rekonstruksi dan Demokratisasi* (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2002), 176-177.

¹⁰Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, *Fikih Anti Korupsi*, 124-125.

melalui pendidikan. Karena pendidikan mempunyai peran penting dalam pembentukan mentalitas, nilai-nilai dan budaya masyarakat. Kelemahan-kelemahan yang menyebabkan kegagalan pendidikan mencetak anak bangsa yang pandai sekaligus berbudi luhur sudah waktunya untuk diperbaiki. Pendidikan Antikorupsi juga penting untuk menjadi bagian dari kegiatan belajar-mengajar di berbagai sekolah.

Salah satu contoh sekolah SMP Al Falah Deltasari Waru Sidoarjo dengan Pendidikan Antikorupsi paling tidak memberikan terobosan baru dalam mencegah tindakan korupsi di negeri ini sedini mungkin, agar generasi 10 sampai 15 tahun yang akan datang tidak lagi bermental korupsi.

Dari latar belakang di atas penulis bermaksud melakukan penelitian tentang **“Pendidikan Antikorupsi di SMP Al Falah Deltasari Waru Sidoarjo”**.

B. Batasan Masalah

Supaya penelitian ini tidak melebar dan lebih fokus, peneliti harus memberikan batasan masalah terkait dengan penerapan pendidikan antikorupsi. Tesis ini hanya membatasi masalah kajiannya pada Program Pendidikan Antikorupsi dan Pelaksanaan Pendidikan Antikorupsi yang meliputi perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran.

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut.

1. Bagaimana Program Pendidikan Antikorupsi di SMP Al Falah Deltasari Waru Sidoarjo?
2. Bagaimana Pelaksanaan Pendidikan Antikorupsi di SMP Deltasari Waru Sidoarjo?

D. Tujuan Penelitian

Sebagaimana permasalahan yang telah penulis rumuskan, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui Program Pendidikan Antikorupsi di SMP Al Falah Deltasari Waru Sidoarjo.
2. Untuk mengetahui Pelaksanaan Pendidikan Antikorupsi melalui di SMP Al Falah Deltasari Waru Sidoarjo.

E. Kegunaan Penelitian

Dengan latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian sebagaimana diuraikan di atas, maka penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat teoritis dan manfaat praktis. Secara lebih rinci, manfaat yang diharapkan dapat disumbangkan oleh penelitian ini adalah:

1. Kegunaan teoritis: hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan konsep bagi upaya memperkuat disiplin ilmu

pendidikan Islam sebagai instrumen penting dalam mencegah peluang terjadinya korupsi, ditinjau dari pendidikan antikorupsi.

2. Kegunaan praktis: hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan Program Pendidikan Antikorupsi dan Pelaksanaan Pendidikan Antikorupsi di sekolah.

F. Kerangka Teoritik

1. Pendidikan

Istilah pendidikan berasal dari bahasa Yunani, Paedagogy, yang mengandung makna seorang anak yang pergi dan pulang sekolah diantara seorang pelayan. Sedangkan pelayan yang mengantar dan menjemput dinamakan paedagogos. Dalam bahasa romawi, pendidikan diistilahkan dengan *Educate* yang berarti mengeluarkan sesuatu yang berada di dalam. Dalam bahasa Inggris, pendidikan diistilahkan *to educate* yang berarti memperbaiki moral dan intelektual.¹¹

Banyak pendapat yang berlainan tentang pendidikan. Walaupun demikian, pendidikan berjalan terus tanpa menunggu keseragaman arti. Salah satu diantara mengatakan bahwa pendidikan dalam arti luas adalah segala sesuatu yang menyangkut proses perkembangan dan pengembangan manusia, yaitu upaya menanamkan dan mengembangkan dan pengembangan manusia, yaitu upaya menanamkan dan mengembangkan nilai-nilai bagi anak didik. Sehingga nilai-nilai yang terkandung dalam

¹¹Wiji Suwarno, *Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan* (Jogjakarta: Ar-Ruzz, 2006), 19.

pendidikan itu menjadi bagian dari kepribadian anak yang gilirannya ia menjadikan orang pandai, baik, mampu dan berguna bagi masyarakat.¹²

Menurut Ki Hajar dewantara menyatakan bahwa pendidikan merupakan tuntutan bagi pertumbuhan anak-anak. Artinya, pendidikan menuntut segala kekuatan kodrat yang ada pada diri anak-anak, agar mereka sebagai manusia sekaligus sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya.¹³

Dalam UU Nomor. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, tercantum pengertian pendidikan:

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.¹⁴

Setiap bangsa tentu akan menyatakan tujuan pendidikannya sesuai dengan nilai-nilai kehidupan yang sedang diperjuangkan untuk kemajuan bangsanya. Walaupun masing-masing bangsa memiliki tujuan hidup berbeda, namun secara garis besar, ada beberapa kesamaan dalam berbagai aspeknya. Pendidikan bagi setiap individu merupakan pengaruh dinamis dalam perkembangan jasmani, jiwa, rasa susila, dan sebagainya.¹⁵

Namun demikian, pendidikan bukan hanya beorientasi pada hal-hal yang bersifat metafisik belaka. Dalam melaksanakan tugasnya sebagai

¹²Abuddin Nata, *Kapita Selekta Pendidika Islam* (Bandung: Angkasa, 2003), 10-11.

¹³Wiji Suwarno, *Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan*, 21.

¹⁴Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sisdiknas (Bandung: Citra Umbara, 2006), 72.

¹⁵Wiji Suwarno, *Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan*, 22.

khalifah fi al-ardh, manusia juga memerlukan pendidikan yang bersifat material. Hanya melalui pendekatan kedua proses tersebut manusia akan dapat melaksanakan tugas dan fungsinya di muka bumi ini dengan sebaik-baiknya. Di sini ia memaknai manusia sebagai khalifah *fil al-ardh* sebagai makhluk yang telah diberikan Allah potensi akal sebagai sarana untuk mengetahui hukum-Nya, menyingkap rahasia alam, dan memanfaatkannya bagi kemaslahatan umat manusia. Menurut Hamka melalui akalunya manusia dapat menciptakan peradabannya dengan lebih baik. Fenomena ini dapat dilihat dari sejarah manusia di muka bumi, berikut bukti peninggalan peradabannya yang dapat disajikan sampai saat ini. Pandangannya ini didasarkannya pada QS. Ar-Rum: 9.

Di samping itu, fungsi pendidikan bukan saja sebagai proses pengembangan intelektual dan kepribadian peserta didik, akan tetapi juga proses sosialisasi peserta didik dengan lingkungan di mana ia berada. Secara inheren, pendidikan merupakan proses penanaman nilai-nilai kebebasan dan kemerdekaan kepada peserta didik untuk menyatakan pikiran dan kemerdekaan kepada peserta didik untuk menyatakan pikiran peserta mengembangkan totalitas.¹⁶

¹⁶Bunyi ayat:

أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۖ كَانُوا أَشَدَّ مِهِم قُوَّةً وَأَنَابُوا بِالْأَرْضِ وَعَمَّوْهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَّوْهَا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ ۖ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسِهِمْ يَظْلِمُونَ ﴿٩﴾

”Dan apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di muka bumi dan memperhatikan bagaimana akibat (yang diderita) oleh orang-orang sebelum mereka? orang-orang itu adalah lebih kuat dari mereka (sendiri) dan Telah mengolah bumi (tanah) serta memakmurkannya lebih banyak dari apa yang Telah mereka makmurkan. dan Telah datang kepada mereka rasul-rasul mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Maka Allah sekali-kali tidak berlaku zalim kepada mereka,

2. Korupsi

Dalam *The Lexicon Webster Dictionary*, kata korupsi berarti; kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidak jujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah.¹⁷

Kartini Kartono, seorang ahli patologi sosial, mendefinisikan korupsi sebagai tingkah laku yang menggunakan wewenang dan jabatan guna mengenduk keuntungan pribadi, merugikan kepentingan umum dan negara.

Dalam perundang-undangan di Indonesia, menurut pasal 2 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 31/1999, korupsi adalah perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korupsi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Definisi ini diperkuat lagi pada pasal 3 bahwa korupsi adalah menyalahgunakan kewenangan, jabatan, atau amanah (*trust*) secara melawan hukum untuk memperoleh keuntungan atau manfaat pribadi dan atau kelompok tertentu yang dapat merugikan negara.¹⁸

G. Kajian Terdahulu

Dalam penelusuran kepustakaan yang dilakukan oleh penulis di perpustakaan pusat dan Program Pascasarjana IAIN Sunan Ampel Surabaya ditemukan beberapa penelitian dan buku yang berkaitan dengan penelitian

akan tetapi merekalah yang berlaku zalim kepada diri sendiri.”(QS. Ar-Rum, 9). Lihat. Samsul Nizar, *Memperbincangkan Dinamika Intelektual dan Pemikiran Hamka Tentang Pendidikan Islam* (Jakarta: Kencana, 2008), 112-113.

¹⁷Ermansjah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 6-7.

¹⁸Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, *Fikih Anti Korupsi*, 11-12.

yang akan dilakukan kendati tidak spesifik membahas Pendidikan Antikorupsi, Seperti. Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara”. Yang ditulis oleh, Jur. Andi Hamzah.¹⁹ Buku ini membahas tentang perbandingan pemberantasan korupsi di berbagai negara seperti Australia, Hongkong, Malaysia, Singapura, Thailand, dan berbagai pula prospek pemberantasan korupsi di Indonesia. Pemberantasan korupsi di berbagai negara tersebut didukung oleh badan atau lembaga pemberantasan korupsi yang independen misalnya *Independent Commission Against Corruption (ICAC)*, Australia dan Hongkong; *Badan Pencegah Rasuah (BPR)*, Malaysia; *Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB)*, Singapura; dan *Counter Corruption Commission (CCC)*, Thailand. Yang kalah pentingnya adalah di samping badan-badan pemberantasan korupsi ini, negara-negara tersebut mempunyai peraturan pemberantasan korupsi yang mempunyai yang dapat dijadikan rujukan bagi peraturan pemberantasan korupsi di Indonesia.

Diantara penelitian yang ditemukan oleh peneliti adalah: skripsi ”Pandangan Ulama NU dan Muhammadiyah tentang Korupsi dan Strategi Pemberantasannya Studi Komparatif Konsep dan Strategi Pemberantasan Korupsi”. Oleh, Qur’ana Aulia Putri Arifin.²⁰ Penelitian ini perkesimpulan bahwa NU mengartikan korupsi sebagai sebuah bentuk *tasarruf* yang merupakan pengkhianatan atas amanah yang diemban dan dapat merugikan publik secara finansial, moral maupun sosial. Selain itu, korupsi juga dianggap

¹⁹Jur. Andi Hamzah, *Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara* (Jakarta:Sinar Grafika, 2005).

²⁰Qur’ana Aulia Puri Arifin,” *Pandangan Ulama NU dan Muhammadiyah Tentang Korupsi dan Strategi Pemberantasannya Studi Komparatif Konsep dan Strategi Pemberantasan Korupsi* (Skripsi- Syariah SJ IAIN Sunan Ampel), Surabaya, 2007).

sebagai tindakan yang menyalahi hukum dan dapat menimbulkan kerugian publik. Adapun strategi pemberantasan korupsi yang ditawarkan oleh NU adalah pencegahan dan pemberantasan korupsi di tengah masyarakat muslim, pemberantasan korupsi dalam konteks negara dan bangsa serta belajar dari negara lain.

Sedangkan korupsi menurut Muhammadiyah adalah tindakan yang bertentangan dengan norma masyarakat, agama, moral dan hukum dengan tujuan memperkaya diri, orang lain atau korupsi yang mengakibatkan rusaknya tatanan yang telah disepakati yang berakibat pada hilangnya hak-hak orang lain, korupsi atau negara yang semestinya diperoleh. Adapun strategi pemberantasan korupsi yang ditawarkan oleh Muhammadiyah adalah dengan belajar dari pengalaman negara lain dan memulai 12 langkah dalam pemberantasan korupsi”.

Penelitian lain yang dilakukan Tim Peneliti Malang berjudul Pengembangan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Madrasah Aliyah (MA) Melalui Model *Social Rekonstrktion* Untuk Pendidikan Anti Korupsi.²¹ Peneliti ini berkesimpulan pengembangan pembelajaran Rekonstruksi sosial lebih bermakna dan efektif untuk peningkatan kualitas pembelajaran dan hasil belajar siswa. Melalui skenario pembelajaran yang didasarkan pada model pembelajaran rekonstruksi sosial untuk pendidikan anti korupsi, terdapat perbedaan cara pandang siswa tentang korupsi seperti yang ditunjukkan dari selisih skor antara pre tes dengan pos tes. Perubahan lain yang tampak pada diri

²¹Tim Penelitian UIN Malang, *Kumpulan Sinopsis Hasil-Hasil Penelitian Pendidikan Agama dan Keagamaan* (Program Peningkatan Kualitas Publik Badan Libang Dan Diklat Departemen Agama RI Tahun 2006).

siswa adalah tumbuhnya kesadaran dalam dirinya untuk menghindari dan ikut mencegah budaya/prilaku korupsi dalam bentuk yang paling sederhana sampai pada tingkat yang paling tinggi.

Jadi penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya (setidak-tidaknya penelitian-penelitian yang diungkapkan dalam bab ini). Bukan saja karena yang diusung tidak sama, tetapi juga pendekatan dan perspektifnya berbeda. Hal yang baru, spesifik, dan strategis dari penelitian ini adalah terletak pada fokus kajian yang bertumpu pada "Pendidikan Antikorupsi di SMP Al Falah deltasari waru Sidoarjo".

H. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif ini dimaksudkan untuk menggambarkan suatu keadaan yang tidak dapat diukur dengan angka, karena mengandung unsur fenomena, realitas sosial yang memiliki keunikan tertentu.

Penelitian kualitatif sebagaimana yang diungkapkan oleh Nana Syaodih Sukmadinata adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktifitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok. penelitian kualitatif mempunyai dua tujuan utama, yaitu pertama, menggambarkan dan mengungkap (*to describe dan explore*) dan kedua

menggambarkan dan menjelaskan (*to describe and explain*).²² Dalam penelitian kualitatif kehadiran dan keterlibatan peneliti merupakan suatu yang penting dan utama karena peneliti harus memahami perilaku yang menjadi sasaran dan juga proses pengumpulan data harus dilakukan dalam situasi sebenarnya.

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian fenomenologi berorientasi untuk memahami, menggali dan menafsirkan arti dari peristiwa-peristiwa, fenomena-fenomena dan hubungan dengan orang-orang yang biasa dalam situasi tertentu. Ini biasa di sebut dengan penelitian kualitatif dengan menggunakan pengamatan terhadap fenomena-fenomena atau gejala-gejala sosial yang alamiah (*nature*), digunakan sebagai sumber data, jenis penelitian ini berdasarkan kenyataan lapangan (*empiris*).

Meurut Bogdan dan Biklen penelitian fenomenologi adalah berusaha memahami makna dari suatu peristiwa atau fenomena yang saling berpengaruh dengan manusia dalam situasi tertentu.²³ Fenomenologi berpendapat bahwa kebenaran suatu itu dapat diperoleh dengan cara menangkap fenomena atau gejala yang memancar dari obyek yang diteliti. Apabila peneliti melakukan penangkapan secara profesional, maksimal, dan bertanggung jawab maka akan dapat diperoleh variasi refleksi dari obyek. Tugas peneliti adalah memberikan interpretasi terhadap gejala tersebut.²⁴

²²Nana Syaodih Sukmadinata, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Bandung: PT Remaja Rosdakarnya, 2009), 60.

²³Iskandar, *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif Dan Kualitatif)* (Jakarta: Gaung PersadaPress, 2009), 204.

²⁴Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 12.

Agar tujuan penelitian ini dapat tercapai maka peneliti melakukan serangkaian tindakan untuk memahami dan juga mengamati situasi dan kondisi, peristiwa yang terjadi yang berkaitan dengan Pendidikan Antikorupsi dilokasi. Hal ini terjadi karena adanya pelibatan secara langsung dengan subjek penelitian sehingga mampu melihat secara langsung, mengeksplorasi situasi dan dapat memberikan kontribusi secara langsung. Dengan demikian data yang diperoleh semakin akurat.

2. Sumber dan Jenis Data

Data-data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah bersumber dari data utama yang berupa kata-kata dan tindakan yang diperoleh dari hasil pengamatan/observasi dan wawancara. Menurut Suharsimi Arikonto yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh. Apabila peneliti menggunakan kuosioner atau wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data tersebut responden, yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti, baik pertanyaan tertulis maupun lisan²⁵.

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua macam, yaitu:

- a. Sumber data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari penelitian, seperti data hasil observasi, data wawancara,²⁶ sumber data dalam penelitian tesis ini, peneliti memilih Kepala Sekolah, waka kurikulum, waka kesiswaan dan guru yang terlibat langsung dalam

²⁵Suharsimi Arikonto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik Edisi Revisi* (Jakarta: PT Rineka cipta, 2006),129.

²⁶Sifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 36.

Program Pendidikan Antikorupsi dan Pelaksanaan Pendidikan Antikorupsi di sekolah.

- b. Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber tidak langsung atau data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen atau naskah-naskah tertulis, seperti arsip resmi dan dokumen sekolah²⁷.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian kualitatif ini akan menggunakan cara-cara yang relevan dengan kebutuhan peneliti dan diharapkan mendapatkan data yang bagus. Menurut Bogdan dan Taylor data-data penelitian kualitatif menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.²⁸

Pada penelitian ini peneliti merupakan instrumen kunci dalam pengumpulan data yang tidak dapat digantikan karena pendekatan penelitian ini adalah kualitatif. Adapun dalam pelaksanaan penelitian kuantitatif yaitu pengambilan data dilakukan secara langsung di lapangan, maka peneliti dalam mengumpulkan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi yang dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Observasi

Observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.²⁹ Adapun teknik observasi ini peneliti lakukan, baik secara langsung maupun tidak

²⁷Ibid., 36.

²⁸Alexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya: 2007), 4.

²⁹S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2007), 158.

langsung. Secara langsung yaitu suatu teknik pengumpulan data yang mana peneliti mengadakan pengamatan dan pencatatan terhadap gejala-gejala atau peristiwa yang tampak terjadi pada obyek pada saat peristiwa atau keadaan itu sedang berlangsung.³⁰

Teknik observasi tidak langsung adalah cara pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan dan pencatatan gejala-gejala yang tampak pada obyek penelitian yang dilakukan oleh peneliti setelah peristiwa atau situasi itu terjadi. Instrumen yang digunakan oleh peneliti dalam hal ini adalah menggunakan catatan anekdot, catatan berkala dan daftar cek.³¹

b. Wawancara

Wawancara (*interview*) adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu *pewawancara* (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan *terwawancara* (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.³² Wawancara digunakan untuk mendapatkan informasi lebih banyak khususnya dari sumber utama.

Wawancara dalam tesis ini, penulis mewawancarai kepala sekolah, waka kurikulum, waka kesiswaan, dan termasuk guru, yang mana dari hasilnya nanti akan didapatkan data mengenai Program Pendidikan Antikorupsi, dan Pelaksanaan Pendidikan Antikorupsi.

³⁰Hadari Nawawi dan Martini Hadari, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1995), 67.

³¹Ibid., 75-76.

³²Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 186.

c. Dokumentasi

Study dokumenter (*documentary study*) merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar maupun elektronik.³³ Data-data tersebut bertujuan untuk memperkuat data-data lainnya. Dengan pertimbangan ini maka peneliti dapat menggunakan studi dokumentasi untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan penelitian yaitu program sekolah, dokumen aktifitas sekolah, foto kegiatan sekolah, profil sekolah dan dokumen lainnya yang dibutuhkan oleh peneliti.

4. Analisis Data

Analisis data menurut Bogdan dan Biklen adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milah menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.³⁴ Analisis data dilakukan selama proses pengumpulan data, dilakukan untuk menyusun data agar dapat ditafsirkan. Analisis data bertujuan untuk mencari dan menata secara sistematis dari catatan hasil observasi, wawancara dan dokumentasi yang telah dilakukan, analisis juga dilakukan untuk mencari makna data.

³³Nana Syaodih Sukmadinata, *Metodologi Penelitian*, 220.

³⁴Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 248.

Dalam melakukan analisis data, ada beberapa tahap yang harus dilakukan oleh peneliti yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan/verifikasi.

a. Reduksi data

Reduksi data adalah proses perampangan, pemilihan data yang penting, disederhanakan dan diabstraksikan. Dalam reduksi data ini ada proses data yang dipilih (*living in*) dan data yang dibuang (*living out*) yang dikerjakan sejak awal penelitian. Artinya data yang penting dimasukkan dan data yang tidak relevan tidak dipakai.

Selama proses reduksi data peneliti dapat melanjutkan ringkasan, pengkodean, menemukan tema, reduksi data berlangsung selama penelitian selesai. Reduksi data merupakan analisis yang menajamkan untuk mengorganisasikan data, dengan demikian kesimpulannya dapat diverifikasikan untuk dijadikan temuan penelitian terhadap masalah yang diteliti.³⁵

b. Melaksanakan display data atau penyajian data

Penyajian data adalah menyajikan sekumpulan informasi yang tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.³⁶ Dalam penyajian data, semua data yang diperoleh baik itu melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dinarasikan hingga membentuk penjelasan yang kongkrit sesuai dengan penelitian.

³⁵Iskandar, *Metodologi Penelitian*, 223.

³⁶Imam Suprayogo, *Metodologi Penelitian Social – Agama* (Bandung: PT Remaja Karya, 2001), 194.

Dalam penyajian data ini dilakukan penyusunan data sebagai hasil reduksi data yang telah dilakukan agar menjadi sistematis dan bisa diambil maknanya. Penyajian data juga dimaksudkan untuk memperoleh pola-pola yang bermakna, serta memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Hal yang harus diperhatikan oleh peneliti dalam penyajian data adalah peneliti harus menyusun secara sistematis, logis dengan tujuan agar hasil penelitian ini dengan mudah dapat dipahami oleh orang lain.

c. Mengambil kesimpulan/verifikasi

Mengambil kesimpulan merupakan analisis lanjutan dari reduksi data, dan display data sehingga data dapat disimpulkan, dan peneliti berpeluang untuk menerima masukan. Penarikan kesimpulan sementara, masih dapat diuji kembali dengan data di lapangan, dengan cara merefleksikan kembali, peneliti dapat bertukar pikiran dengan teman sejawat, triangulasi, sehingga kebenaran ilmiah dapat tercapai. Bila proses siklus interaktif ini berjalan dengan kontinyu dan baik, maka keilmiahannya hasil penelitian dapat diterima. Setelah hasil penelitian telah diuji kebenarannya, maka peneliti dapat menarik kesimpulan dalam bentuk deskriptif sebagai laporan penelitian.³⁷

Dengan demikian maka kegiatan yang dilakukan dalam analisis data/verifikasi adalah diawali dengan kegiatan mereduksi data yang dilakukan peneliti dari hasil wawancara, dan observasi catatan lapangan

³⁷Iskandar, *Metodologi Penelitian*, 223-224.

yang diperoleh dalam proses penelitian. Dan kemudian pada akhirnya peneliti menampilkan data tersebut dalam paparan sebagai temuan penelitian.

5. Pemeriksaan Keabsahan Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan kriteria keabsahan data untuk menguji data-data yang telah ada. Keabsahan data yang dipakai dalam penelitian kualitatif ini *credibility*. Kredibilitas data digunakan untuk membuktikan kebenaran dan kesesuaian data antara pengamatan dengan kenyataan dilapangan. Apakah data sesuai dengan yang sebenarnya atau tidak. Penjaminan keabsahan data melalui kredibilitas dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa kriteria teknik pemeriksaan yang dikemukakan oleh pakar metodologi penelitian kualitatif yaitu Moleong, Danmin Sudarwan, dan Sugiyono yaitu:

1. Perpanjangan keikutsertaan peneliti dilapangan
2. Meningkatkan ketekunan pengamatan
3. Triangulasi
4. Analisis kasus negatif
5. Pemeriksaan sejawat melalui diskusi
6. Tersedianya referensi
7. Member chek³⁸

³⁸Iskandar, *Metodologi Penelitian*, 229.

Namun karena keterbatasan waktu, maka dalam penelitian ini hanya menempuh beberapa teknik saja dalam pemeriksaan keabsahan data yaitu: triangulasi, dan pengecekan data (*member check*).

Dalam rangka menghilangkan bias pemahaman peneliti dengan si pelaku diadakan pengecekan berupa triangulasi, yakni teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.³⁹

Pengecekan data yang diperoleh peneliti dari pemberi data. Adapun pengecekan data meliputi katagori analitis, penafsiran dan kesimpulan. Data yang telah diverifikasi oleh peneliti dapat dikoreksi oleh pemberi data dari segi pandangan situasi mereka sendiri. Apabila data yang diberikan kepada peneliti tidak disepakati, maka kepercayaan dapat diterima, jika penafsiran data yang diberikan kepada peneliti tidak disepakati, maka peneliti perlu mengadakan diskusi kembali dengan pemberi data. Dengan demikian, maka terwujud kepercayaan data penelitian.⁴⁰

I. Sistematika Pembahasan

Agar terbangun kerangka pemahaman yang jelas tentang tesis ini, maka sistematika laporan penelitian sebagai berikut.

Bab pertama, pendahuluan, mencakup latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka

³⁹Moleong, *Metodologi Penelitian*, 330.

⁴⁰Iskandar, *Metodologi Penelitian*, 234.

teoritik, penelitian terdahulu, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, kajian pustaka mencakup pendidikan, korupsi, dan pendidikan antikorupsi.

Bab ketiga, penyajian data, mencakup sejarah singkat SMP Al Falah, program Pendidikan Antikorupsi, dan Pelaksanaan Pendidikan Antikorupsi.

Bab empat, analisis data, mencakup Program Pendidikan Antikorupsi, dan Pelaksanaan Pendidikan Antikorupsi.

Bab lima, penutup, mencakup simpulan dan saran. Simpulan dimaksudkan untuk memberi ringkasan tentang Pendidikan Antikorupsi di SMP Al Falah Deltasari Waru Sidoarjo. Saran dimaksudkan untuk memberikan masukan terkait dengan keberlanjutan Pendidikan Antikorupsi di SMP Al Falah Deltasari Waru Sidoarjo.